

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan konsep-konsep yang menjadi landasan utama baik untuk melakukan analisa penelitian maupun untuk memperluas wawasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan perpustakaan masyarakat agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dicantumkan pada bab sebelumnya.

2.1 Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Sosial

Secara konseptual, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna. Midgley (1997) dalam Adi (2005, h. 16) mengartikan kesejahteraan sosial sebagai: *“a state or condition of human well-being that exist when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized.”*

Definisi diatas dapat diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut: “suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan”.

Kemudian menurut Suradi dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2007, h. 1) mengemukakan bahwa dalam perspektif teoritis, kesejahteraan sosial sebagai kondisi kehidupan dan penghidupan mencakup: (1) kemampuan setiap orang dalam mengatasi masalah; (2) kemampuan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan; dan (3) kemampuan setiap orang dalam melaksanakan peran sosialnya dengan menjunjung tinggi hak-hak.

Di Indonesia, istilah kesejahteraan sosial dirumuskan dalam UU RI No. 11 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1, yang didefinisikan sebagai: kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Beberapa pengertian diatas memiliki substansi yang sama dimana kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau tata kehidupan dimana setiap orang, setiap keluarga, setiap golongan atau masyarakat, selalu dapat merasakan adanya keselamatan lahir batin, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik material maupun spiritual) serta menjalankan peran sosialnya dengan baik.

Menurut Suharto (2005) selain sebagai kondisi, kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprahnya pekerja sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain sebagai tujuan akhir dan sebagai arena utama berkiprahnya pekerja sosial, kesejahteraan sosial juga merupakan kegiatan yang terorganisasi.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir pembangunan nasional yang dicapai melalui serangkaian program terorganisir yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Menurut Suharto (2006) kesejahteraan sosial memiliki dua dimensi:

1. *State of human well-being*, dimana kesejahteraan sosial dipandang sebagai kebaikan sosial yang dalam bahasa Inggris dinamakan *social well-fare* sebagai lawan dari *social ill-fare* (ketidaksehatan sosial). Artinya, kesejahteraan sosial menunjuk pada kondisi kehidupan sejahtera, kebaikan sosial, keadaan yang baik, kemakmuran, kebahagiaan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Sebagai contoh, orang memiliki kesejahteraan sosial jika memiliki tubuh yang sehat, penghasilan yang memadai, rumah yang layak huni, keterampilan dan pengetahuan dasar, serta dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
2. *System of social services*, dimana kesejahteraan sosial diartikan sebagai sebuah sistem kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (*civil society*). Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, antara lain jaminan sosial (*social security*), perawatan kesehatan,

penyediaan pendidikan dasar dan khusus, penyediaan perumahan publik, dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).

Berdasarkan kedua dimensi kesejahteraan sosial diatas, maka pembangunan bagi kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (lihat dimensi pertama) melalui sistem pelayanan sosial yang terencana dan berkesinambungan (lihat dimensi kedua).

Pada awalnya, pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi (Adi, 2005). Hal ini disebabkan oleh pemahaman banyak orang yang menggunakan istilah 'pembangunan' sebagai perubahan ekonomi dengan munculnya industrialisasi. Seiring dengan perkembangan globalisasi sekarang ini, pembangunan sosial menjadi suatu agenda penting dengan semakin besarnya perhatian pada hak-hak asasi manusia, demokratisasi dan *civil society*.

Seperti dikemukakan Midgley dalam Adi (2002, h. 118), pembangunan sosial merupakan "suatu proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi".

Pendekatan pembangunan sosial dapat saling bekerjasama dengan pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi, seperti dua sisi mata koin yang saling melengkapi dimana pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna (*meaningless*) tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan (Adi, 2002, h.122).

Hal ini perlu direpson dengan serius oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi memang penting karena pendekatan ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan. Namun, pendekatan ini juga tidak mungkin mengabaikan pembangunan sosial,

khususnya membangun manusia sebagai investasi sosial jangka panjang. Sehingga kedua pendekatan ini digunakan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Midgley (dalam Adi, 2002), terdapat delapan aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sosial:

1. Proses pembangunan sosial tidak terlepas (dipisahkan secara nyata) dari pembangunan ekonomi. Hal inilah yang membuat pendekatan pembangunan sosial berbeda dengan pendekatan residual dan institusional dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, karena pendekatan ini secara langsung menitikberatkan pada intervensi sosial terhadap pembangunan itu sendiri.
2. Pembangunan sosial mempunyai fokus yang interdisipliner yang diambil dari berbagai jenis ilmu sosial yang diolah untuk memformulasikan intervensi sosial (perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bukan sekedar menangani masalah yang terjadi di masyarakat).
3. Dalam konsep pembangunan sosial tergambar adanya suatu proses yang dinamis yang mencakup unsur perubahan dan pertumbuhan.
4. Proses perubahan yang terdapat dalam pendekatan pembangunan sosial pada dasarnya bersifat progresif.
5. Proses pembangunan sosial adalah intervensionist, dimana pembangunan ini hanya dapat terjadi jika pelaku perubahan melakukan berbagai upaya perubahan sosial yang tidak secara natural, melainkan terencana, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
6. Tujuan pembangunan sosial diusahakan dapat melalui beberapa strategi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi-strategi ini akan menghubungkan intervensi sosial dengan upaya-upaya pembangunan ekonomi.
7. Pembangunan sosial lebih memusatkan pada populasi sebagai suatu kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik, dimana pembangunan tidak hanya difokuskan pada mereka yang membutuhkan, tetapi lebih difokuskan pada mereka yang 'diterlantarkan' oleh pembangunan

(ekonomi) yang terjadi selama ini, seperti kelompok miskin yang ada di perkotaan dan pedesaan, serta kelompok minoritas.

8. Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*promotion of social welfare*). Kesejahteraan sosial yang dimaksud oleh Midgley adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi sosial dan bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Dalam pembangunan sosial sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun level pembangunan sosial terbagi menjadi 4, sebagai berikut: (Adi, 2002, h. 138-147)

1. Pembangunan di level individu dan keluarga (level mikro)

Pembangunan ini lebih mengarah pada fungsi rehabilitatif dan remedial dimana individu ataupun keluarga yang bermasalah menjadi fokus penanganan. Contohnya, penanganan anak-anak korban kekerasan ataupun penyalahgunaan NAPZA. Pelaksana dan penggagas dari penanganan sosial secara rehabilitatif ini bisa dilakukan oleh individu (tokoh) yang menonjol di suatu masyarakat ataupun sekelompok individu yang saling bergabung mengupayakan usaha kesejahteraan sosial.

2. Pembangunan di level organisasi dan komunitas (level mezzo)

Pembangunan ini lebih mengarah pada program yang bersifat kreatif, proaktif, dan preventif yang biasanya dilakukan melalui intervensi komunitas seperti pengembangan masyarakat (*community development*), pendekatan pelayanan masyarakat (*community services approach*), dan pendidikan masyarakat (*community education*).

Adi menjelaskan contoh pendekatan ini, yaitu suatu komunitas di tingkat lokal di Bangalore, salah satu kota di India, yang memutuskan untuk

membangun taman pada suatu areal kosong yang kurang terpelihara. Taman tersebut merupakan inisiatif dari *citizen neighbourhood* (perkumpulan warga di tingkat kelurahan) yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Karena selain sebagai taman, areal itu juga berfungsi sebagai tempat bermain (*play ground*). Untuk biaya pengelolaan taman, setiap warga yang hendak bersantai, bermain dan berolah raga di taman tersebut dikenakan biaya masuk sebesar Rp 500. Hal yang menarik disini adalah partisipasi masyarakat di daerah tersebut telah menghasilkan suatu taman yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, tentunya dengan dilengkapi perangkat aturan yang jelas, seperti dilarang membawa binatang peliharaan atau membuang sampah sembarangan.

3. Pembangunan di level provinsi, regional, ataupun nasional (level makro)
Pembangunan ini merupakan pembangunan pada level normatif dimana agen perubahan berusaha melibatkan diri pada upaya perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial. Pembangunan sosial pada level ini lebih diarahkan pada bagaimana seorang pakar kesejahteraan sosial berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di level yang lebih makro dari komunitas lokal, sehingga warna proses perencanaan dan pembuatan kebijakan yang dilahirkan tidak bersifat instruktif, sentralistik, dan otoriter, melainkan lebih memperhatikan unsur partisipasi publik, desentralistik, dan demokratis. Sebagai contoh, jika pada pembangunan di tingkat komunitas dalam hal pembangunan taman diatas merupakan inisiatif warga, maka kaitan dengan kebijakan di level makro adalah menyediakan fasilitas sosial dalam bentuk taman yang dikelola oleh pemerintah kota tanpa memungut biaya dari warga.
4. Pembangunan di level internasional (level global)
Pembangunan ini menitikberatkan pada peran agen perubahan (*change agent*) dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat antar negara. Sebagai contoh, dalam agenda pengembangan partisipasi masyarakat dan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clear governance*), baik pelaku perubahan pada organisasi pemerintah dan organisasi non

pemerintah berupaya terlibat dalam berbagai pertemuan dan studi banding antar negara. Tidak hanya di tingkat nasional, agen perubahan juga berusaha untuk dapat mempengaruhi perubahan di tingkat internasional.

Konsep kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial ini sangat erat kaitannya dengan konsep perpustakaan, dimana perpustakaan merupakan sebuah sistem pelayanan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa pengetahuan dan informasi yang terkandung di dalam kumpulan buku-buku.

2.2 Perpustakaan

Istilah ‘perpustakaan’ dalam bahasa Indonesia (berasal dari kata Sanskerta *pustaka*) artinya kitab, buku. Sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal istilah *library* yang berasal dari kata Latin *liber* atau *libri*, artinya buku. “Dari kata Latin tersebut terbentuklah istilah *librarius* yang artinya tentang buku. Dalam bahasa Belanda *bibliotheek*, Jerman *bibliothek*, Perancis *bibliothèque*, Spanyol *biblioteca*, dan Portugal *biblioteca*. Semua istilah itu (berasal dari bahasa Yunani *biblia*) artinya tentang buku, kitab” (Tarto, 2007, h. 1).

Milburga, dkk, (1991, h. 5) mendefinisikan perpustakaan sebagai “Suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi”. Menurut IFIA (*International Federation of Library Associations and Institutions*), perpustakaan merupakan kumpulan sumber informasi dalam komputer baik yang tercetak maupun non tercetak yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai (Sulistyo, 2003).

Menurut The Oxford English Dictionary, kata *library* atau perpustakaan mulai digunakan dalam bahasa Inggris tahun 1374, yang berarti sebagai “suatu tempat buku-buku diatur untuk dibaca, dipelajari atau dipakai sebagai bahan rujukan” (Waluyo, 2006, h. 1). Pada abad ke-19, pengertian tersebut berkembang menjadi: suatu ruangan berisi koleksi buku yang terpelihara

dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, pengertian perpustakaan memperoleh penghargaan yang tinggi, bukan sekadar suatu gedung yang berisi koleksi buku yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada tahun 1970, The American Library Association menggunakan istilah perpustakaan untuk suatu pengertian yang luas yaitu termasuk pengertian: pusat media, pusat belajar, pusat sumber pendidikan, pusat informasi, pusat dokumentasi, dan pusat rujukan. Seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 11, disebutkan pula bahwa “Perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional”.

Pengertian diatas telah mengarahkan pada tiga hal yang mendasar sekaligus, yaitu hakikat perpustakaan sebagai salah satu sarana pelestarian bahan pustaka; fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan; serta tujuan perpustakaan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pembangunan nasional.

Menurut catatan sejarah, keberadaan sebuah perpustakaan telah berkembang bersamaan dengan budaya umat manusia, karena pada hakikatnya perpustakaan merupakan bagian dari hasil peradaban dan budaya (hasil cipta, karsa, dan karya) manusia. Sebuah perpustakaan lebih tua daripada buku, kertas, dan mesin cetak. Koleksi perpustakaan telah ada pada tulisan-tulisan di batu-batuan, kulit binatang, daun lontar, tablet tanah liat (*clay tablets*), dan sebagainya. Seiring perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, perpustakaan semakin berkembang. Perkembangan tersebut meliputi jenis perpustakaan, koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana, serta masyarakat pemakainya.

Dalam kehidupan modern, perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang penting untuk menstimulasi aktivitas intelektual, spiritual serta kultural

masyarakat. Fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk menggali pengetahuan dan keterampilan, atau untuk mendapat bacaan hiburan saja. Namun, jauh lebih luas dari itu, Sujono HS (dalam Firmansyah, 2009) menjelaskan bahwa:

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat melaksanakan pendidikan masyarakat di luar sekolah dimana masyarakat dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan proses belajar mandiri dalam pembentukan pribadi, mendapatkan keterampilan, mengenal berbagai macam perkembangan sosial, politik, dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat maupun dalam perkembangan global.

Keberadaan perpustakaan diharapkan pula dapat bermanfaat dalam menggali potensi masyarakat melalui bahan bacaan. Selain itu, pemanfaatan perpustakaan secara maksimal akan membebaskan masyarakat dari buta aksara, sehingga mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penyelenggaraan perpustakaan juga terkait erat dengan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Penyelenggaraan perpustakaan merupakan salah satu upaya pemberdayaan sosial yang menyiapkan masyarakat supaya menjadi masyarakat yang sadar informasi, masyarakat yang kaya informasi atau bahkan mencapai tingkatan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Untuk mencapai tingkatan masyarakat tersebut membutuhkan suatu proses yang bertahap dan dukungan dari berbagai komponen yang ada di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan pengadaan perpustakaan, seperti yang terdapat dalam Bab VI Undang-Undang No. 43 Tahun 2007, antara lain:

1. Pembentukan perpustakaan

Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki koleksi perpustakaan
- b. Memiliki tenaga perpustakaan
- c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan
- d. Memiliki sumber pendanaan
- e. Memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, sehingga secara formal perpustakaan masuk kedalam sistem perpustakaan nasional untuk bersinergi dan terkoordinasi dengan perpustakaan lainnya.

Adapun Sutarno (2006, h. 12-13) mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah perpustakaan, antara lain:

- a. Adanya kumpulan buku-buku dan bahan pustaka lainnya, baik tercetak, terekam, maupun dalam bentuk lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Koleksi tersebut ditata menurut suatu sistem tertentu, diolah/diproses meliputi registrasi dan identifikasi, klasifikasi, katalogisasi, dan dilengkapi dengan perlengkapan koleksi, seperti slip buku, kartu-kartu katalog, kantong buku dan lain sebagainya. Koleksi itu tidak sekedar ditumpuk, sehingga terkesan seperti gudang buku.
- c. Semua sumber informasi ditempatkan di gedung atau ruangan tersendiri, dan sebaiknya tidak disatukan dengan kantor atau kegiatan yang lain.
- d. Perpustakaan semestinya dikelola atau dijalankan oleh petugas-petugas, dengan persyaratan tertentu yang melayani pemakai, dengan sebaik-baiknya.

- e. Ada masyarakat pemakai perpustakaan tersebut, baik untuk membaca, meminjam, meneliti, menggali, menimba, dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga perpustakaan sering disebut sebagai gudang ilmu.
- f. Perpustakaan merupakan institusi yang perlu bermitra dengan lembaga yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan secara langsung dan tidak langsung, baik formal maupun nonformal.

Pembentukan perpustakaan (yang diatur dalam UU No.43 tahun 2007) dibagi menjadi dua jenis: Pertama, perpustakaan khusus yaitu perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Kedua, perpustakaan umum, yaitu perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

2. Penyelenggaraan perpustakaan

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri dari:

- a. perpustakaan pemerintah;
- b. perpustakaan provinsi;
- c. perpustakaan kabupaten/kota;
- d. perpustakaan kecamatan;
- e. perpustakaan desa;
- f. perpustakaan masyarakat;
- g. perpustakaan keluarga; dan
- h. perpustakaan pribadi.

3. Pemeliharaan perpustakaan, mencakup kegiatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan

Tahap ini merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, pengelolaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas perpustakaan secara berkesinambungan. Pemeliharaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan

kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penelitian ini, Kedai Baca SABAR, sebagai perpustakaan masyarakat yang diteliti, telah mencapai pada tahap pemeliharaan (*maintainance*), dimana kegiatan yang ada di lokasi lapangan terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Tegal Gundil untuk menjaga kelestarian perpustakaan masyarakat agar tetap dapat berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat penggunanya.

2.3 Perpustakaan Masyarakat

Seperti dikemukakan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 di atas, Wicaksono (2008, h. 4) pun mendefinisikan perpustakaan masyarakat sebagai perpustakaan milik masyarakat, "... artinya perpustakaan dibangun dan dikelola serta dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat sekitar". Dengan demikian masyarakat berperan penting (sebagai subjek dan objek) dalam pendirian, pengelolaan, serta pemeliharaan perpustakaan tersebut.

Selain itu, proses pembentukan perpustakaan masyarakat benar-benar dari keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mereka akan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perpustakaan yang ada. Seperti penjelasan Sutarno (2006, h. 232). "Atas dasar perasaan ikut memiliki dan ikut memelihara serta merawat (*meluhandarbeni lan melu hangkrukebi*), atau adanya *sense of belonging and sense of responsibility*, maka anggota masyarakat lebih tergugah untuk memajukan, dan tertarik memanfaatkannya". Perpustakaan yang timbul dari keinginan masyarakat akan menjadikan kegiatan di perpustakaan berjalan dengan baik. Masyarakat setempat juga akan mendapatkan nilai tambah, baik dalam ilmu pengetahuan, informasi maupun jasa perpustakaan lainnya.

Perpustakaan masyarakat atau biasa disebut taman bacaan rakyat merupakan embrio atau cikal bakal jenis perpustakaan umum. Balai PBB yang bergerak dalam bidang perpustakaan yaitu UNESCO (*united, national, educational, scietific, and cultural organization*) mendefinisikan perpustakaan umum sebagai berikut:

The public library is the local centre of information, making all kinds of knowledge and information readily available to its users... The public library, the local gateway to knowledge, provides a basic condition for life-long learning, independent decision-making and culture development of the individual and social groups
<http://www.ifla.org/documents/libraries/policies/unesco.htm> (Sutarno, 2006, h. 38)

Perpustakaan umum merupakan pusat informasi masyarakat yang menyiapkan ketersediaan berbagai pengetahuan dan informasi bagi para pemakainya ... perpustakaan umum, sebagai gerbang masyarakat menuju pengetahuan, menyediakan kondisi dasar bagi pembelajaran seumur hidup, kemandirian membuat keputusan, dan perkembangan kebudayaan baik bagi individu maupun kelompok sosial.

Definisi tersebut menjelaskan beberapa poin penting. Pertama, perpustakaan umum sebagai tempat pembelajaran seumur hidup (*life-long learning*), karena perpustakaan umum merupakan tempat dimana semua lapisan masyarakat (dari segala umur, jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial-ekonomi) bisa terus belajar tanpa batas ataupun ruang-ruang kelas seperti pada sekolah formal. Jika di sekolah seseorang diajarkan agar tidak buta huruf dan memahami makna bacaan, di perpustakaan umum seseorang diajak untuk membuka wawasan, berfikir kritis, dan mencermati masalah.

Poin kedua, perpustakaan umum sebagai katalisator perubahan budaya. Perubahan perilaku masyarakat pada hakikatnya adalah perubahan budaya masyarakat. Perpustakaan umum merupakan tempat strategis untuk mempromosikan segala perilaku yang meningkatkan produktifitas masyarakat. Individu komunitas yang berpengetahuan akan membentuk kelompok komunitas berpengetahuan. Perubahan pada tingkat individu akan membawa perubahan pada tingkat masyarakat. Komunitas yang berbudaya adalah komunitas yang berpengetahuan dan produktif, dan komunitas yang produktif mampu melakukan perubahan dan meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Poin ketiga, perpustakaan umum dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Perpustakaan umum adalah tempat dimana segala lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi prasangka agama, ras, kepangkatan, strata, kesukuan, golongan, dan lain-lain. Perpustakaan umum sangat strategis dijadikan tempat anggota komunitas berkumpul dan mendiskusikan beragam masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Disini, perpustakaan tidak hanya menyediakan ruang baca, tetapi juga menyediakan ruang publik bagi komunitasnya untuk berdiskusi bersama. Tugas pustakawanlah untuk mendokumentasikan semua pengetahuan publik yang dihasilkan dan menyebarluaskan ke anggota komunitas yang lain. Seorang pustakawan dituntut tidak hanya mampu mengolah informasi, tetapi juga harus punya kepekaan sosial yang tinggi dan skill berkomunikasi yang baik.

Sebagai perpustakaan umum, perpustakaan masyarakat memiliki tujuan utama yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik, menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, murah bagi masyarakat, serta membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Perpustakaan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam membangun masyarakat, mengenal dan memanfaatkan informasi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana program pemerintah di bidang pendidikan.

Namun, seperti yang dikemukakan Sutarno (2006, h. 44), "...perlu diakui bahwa keberadaan perpustakaan masyarakat tidak kuat melembaga, dan tergantung pada komunitas masyarakat yang peduli berpartisipasi dalam mengelola dan membiayainya". Dengan kata lain, jika pengelolanya terus aktif, perpustakaan masyarakat akan tetap eksis. Sedangkan jika perhatian dan kepedulian pengelolanya menurun, maka akan langsung berdampak pada kelangsungan hidup perpustakaan masyarakat tersebut. Oleh karena itu keadaan perpustakaan masyarakat selalu pasang dan surut.

Pasang surut aktivitas di perpustakaan selalu dikaitkan dengan minat baca masyarakat. Sutarno (2006) menjelaskan bahwa istilah minat dan budaya

baca yang rendah bersifat relatif dan tidak mutlak, dalam arti benar untuk sebagian anggota masyarakat dan salah untuk sebagian anggota masyarakat lainnya. Minat dan budaya masyarakat yang rendah dapat terjadi pada beberapa kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut:

1. Akses informasi dari dan ke perpustakaan.

Keterbatasan akses informasi dari perpustakaan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti: kurangnya sosialisasi dan pemasyarakatan, publikasi melalui brosur atau media lain, tempat perpustakaan yang kurang strategis, dan terbatasnya kegiatan perpustakaan yang dapat diketahui atau diikuti oleh masyarakat. Sedangkan keterbatasan akses informasi ke perpustakaan misalnya kurang atau tidak adanya papan atau sarana penunjuk ke perpustakaan, jalur angkutan umum yang belum memadai, serta tingkat kesibukan kelompok masyarakat yang semestinya merupakan pelanggan atau konsumen perpustakaan.

2. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih berada di bawah standar.

Telah diketahui bahwa pemakai perpustakaan adalah mereka yang berkecimpung dengan dunia informasi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, masyarakat yang tingkat pendidikannya masih relatif terbatas, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung, menyebabkan tingkat ketertarikan dan kebutuhan akan layanan perpustakaan juga menjadi belum optimal. Perpustakaan terkait langsung dengan aktivitas membaca, belajar, informasi, penelitian, dan kegiatan yang sejenis. Sehingga untuk masyarakat tertentu belum memanfaatkannya secara sadar dan atas kehendaknya sendiri.

3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan.

Harga buku yang mahal menyebabkan kurangnya perhatian untuk membeli atau memiliki buku, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang belum beruntung. Hal ini menyebabkan terbatasnya kebiasaan membaca di rumah karena keterbatasan bahan bacaan, kemudian minat untuk ke perpustakaan untuk membaca pun menjadi berkurang. Mereka tidak menyadari bahwa membaca di perpustakaan

tidak harus membayar. Kondisi demikian berujung pada suatu kesimpulan (kasar) bahwa kondisi sosial ekonomi yang belum baik dapat berpengaruh pada minat masyarakat ke perpustakaan terutama perpustakaan umum.

4. Layanan perpustakaan pada masyarakat yang belum merata.

Beberapa bentuk pelayanan perpustakaan antara lain: layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai, berorientasi pada pemakai, berlangsung cepat waktu dan tepat sasaran, menarik dan menyenangkan sehingga mengundang rasa ingin kembali, bersifat informatif, membimbing, dan mengarahkan. Layanan perpustakaan kepada masyarakat pemakai yang belum merata disebabkan oleh banyak hal. Namun, yang terpenting adalah sikap aktif baik dari petugas perpustakaan maupun masyarakat dimana jika kedua belah pihak sudah saling berjumpa dan saling mengetahui kebutuhan masing-masing, maka dapat dilakukan pemecahan berdasarkan alternatif-alternatif yang ada.

5. Apresiasi dan respon masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Pada dasarnya apresiasi dan respon masyarakat terhadap perpustakaan berkaitan erat dengan kebiasaan membaca, tingkat pendidikan, dan kondisi serta lingkungannya. Jika semua itu telah berjalan baik, maka secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan perpustakaan. (Sutarno, 2006, h. 257-260)

Dikutip lebih lanjut dari Sutarno (2006), adapun minat dan budaya baca masyarakat yang baik dapat ditemui pada kelompok masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat terpelajar

Karena aktivitas keseharian mereka tak bisa terlepas dari buku dan bahan bacaan untuk mendukung agar tugas-tugas belajarnya berhasil dengan baik.

2. Tingkat kesadaran tentang pentingnya perpustakaan telah meningkat.
Dengan demikian, mereka akan dengan sendirinya aktif berkunjung ke perpustakaan untuk membaca, belajar dan melakukan kegiatan ilmiah lainnya.
3. Masyarakat memiliki akses dan informasi ke perpustakaan yang mudah.
Akses ke perpustakaan yang dapat diakses dengan mudah akan meningkatkan minat dan keinginan untuk ke perpustakaan. Apalagi jika telah menyadari bahwa perpustakaan memberikan sesuatu yang berguna, baik dalam belajar, bekerja, mengembangkan ilmu pengetahuan, maupun sebagai media rekreasi.
4. Mereka yang kondisi sosial ekonominya lebih beruntung.
Apabila kebutuhan pokok sehari-hari tidak menjadi masalah, maka anggota masyarakat dapat memilih suatu kegiatan lain yang bermanfaat, seperti mencari hiburan atau kesenangan lain. Dalam hal ini, perpustakaan merupakan salah satu alternatif untuk mengisi kebutuhan, yakni memberikan suasana yang menarik untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara mudah dan murah. Meskipun pada dasarnya perpustakaan diperuntukkan bagi siapa saja.
5. Jangkauan layanan perpustakaan memadai.
Sebuah perpustakaan yang berada di tengah-tengah masyarakat dengan lingkungan yang terbatas dapat dijangkau dengan mudah, sehingga masyarakat tidak sulit untuk menikmati layanan perpustakaan.

Pengelola perpustakaan masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dalam masyarakat, yayasan, atau perorangan. Hal ini mengingatkan pemerintah tak akan sanggup untuk membangun dan menyediakan semua sarana dan prasarana serta isi perpustakaan. Masyarakat memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk ikut berperan dalam membangun dan mengembangkan perpustakaan guna melayani mereka yang membutuhkan informasi.

2.4 Masyarakat

Konsep masyarakat perlu dipahami dengan baik, karena masyarakat memiliki persoalan yang tidak sederhana. Pemahaman terhadap kompleksitas masyarakat tersebut memerlukan berbagai perspektif ilmu sosial.

Masyarakat merupakan istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi” (Koentjaraningrat, 1990, h. 143). Seperti yang dikemukakan Marion Levy dalam makrososiologi, empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, antara lain:

1. kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu;
2. rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi;
3. kesetiaan pada suatu “sistem tindakan utama bersama”; dan
4. adanya sistem tindakan utama yang bersifat “swasembada”.

(Sunarto, 2000, h. 56)

Dikutip lebih lanjut, Inkeles mengemukakan bahwa selain harus memenuhi keempat kriteria di atas, untuk dinamakan masyarakat, suatu kelompok harus dapat bertahan stabil untuk beberapa generasi walaupun sama sekali tidak ada orang atau kelompok lain di luar kelompok tersebut.

Seperti pandangan Talcott Parsons, sosiolog modern, “Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang swasembada (*self subsistent*), melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya” (Sunarto, 2000, h. 57). Edward Shils pun menekankan pada aspek pemenuhan keperluan sendiri (*self sufficiency*) yang dibaginya ke dalam tiga komponen: pengaturan diri, reproduksi sendiri, dan penciptaan diri (*self-regulation, self-reproduction, self-generation*).

Dapat dilihat bahwa konsep masyarakat memiliki makna khusus. Dalam sosiologi, berbeda dengan penggunaan istilah dalam bahasa sehari-hari, tidak semua kelompok dapat disebut masyarakat. Seperti diungkapkan

Koentjaraningrat (1990), tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus, yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan, serta bersifat mantap dan kontinyu, atau dengan kata lain telah menjadi suatu adat istiadat yang khas. Ciri lain yang harus dimiliki masyarakat adalah suatu rasa identitas diantara para warga atau anggotanya, bahwa mereka memang suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya.

Dengan menggunakan sudut pandang lain, masyarakat dapat dipahami dalam empat unsur yang dikemukakan Suradi (2007, h. 10), sebagai berikut:

1. Unsur demografi atau penduduk

Pada unsur demografi ini di dalamnya meliputi: proporsi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dan etnis/suku.

2. Unsur geografi atau kewilayahan

Pada unsur geografi ini di dalamnya meliputi: tipe wilayah (desa-kota, pantai, pelabuhan, pertanian, pegunungan, industri, dan lain-lain), sarana transportasi, orbitasi dan lain-lain.

3. Unsur sosial budaya

Pada unsur sosial budaya di dalamnya meliputi kelembagaan, kepranataan, dan nilai sosial budaya lokal (adat, sistem religi, dan lain-lain)

4. Unsur infrastruktur

Pada unsur infrastruktur sosial di dalamnya meliputi sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas sehari-hari dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dalam penelitian ini, penting untuk memahami masyarakat sebagai obyek penelitian yaitu masyarakat mana yang berpartisipasi dalam memelihara perpustakaan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat wilayah Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kumpulan orang di wilayah Tegal Gundil dapat disebut masyarakat karena telah memenuhi kriteria-kriteria diatas; unsur demografi, geografi, sosial

budaya, dan unsur infrastruktur; dapat bertahan dalam beberapa generasi; serta rasa identitas bersama. Masyarakat ini merupakan pendiri, pengelola, sekaligus pemelihara Kedai Baca SABAR sebagai perpustakaan masyarakat. Dengan demikian, peran serta/partisipasi mereka sangat penting di dalam pemeliharaan suatu perpustakaan masyarakat. Berikut akan dijabarkan konsep mengenai partisipasi masyarakat yang terkait dengan tujuan penelitian.

2. 5. Partisipasi Masyarakat

2.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi berasal dari bahasa latin "*participatio*", yang berarti mengambil bagian. Kata "*participatio*" berasal dari kata kerja "*participare*" yang berarti ikut serta. Maka kata partisipasi mengandung pengertian aktif, yaitu "adanya kegiatan atau aktivitas". Mubyarto (1984) dalam Ndraha (1990, h. 102) mendefinisikan partisipasi sebagai "kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri". Definisi tersebut memperlihatkan bahwa seseorang yang aktif berpartisipasi tidak harus mengesampingkan keperluan pribadi atau berada di suatu kegiatan pembangunan yang menyangkut hidup mereka secara langsung karena partisipasi dilakukan secara sukarela dan dalam bentuk yang bermacam-macam.

Adapun Davis (1962) dalam Sastropetro (1986, h. 13), terdapat tiga unsur penting dalam konsep partisipasi:

1. Partisipasi/keterlibatan/peran serta sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.

3. Tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa “*sense of belongingness*”.

Terdapat beberapa pengertian lain mengenai partisipasi, diantaranya definisi-definisi yang dikemukakan Mikkelsen dalam Adi (2007b, h. 106-107) berikut:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukannya sendiri oleh masyarakat.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri.

Menurut Mikkelsen, beberapa pengertian partisipasi diatas kadangkala lebih merupakan kata-kata populer yang sering digunakan dan belum bermakna sebagai partisipasi yang sesungguhnya. Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen (dalam Adi, 2007b, h. 108) “berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dari suatu proses demokrasi (*genuine participation, initiated and managed by people themselves, is a goal in the democratic process*)”.

Seperti dikemukakan pada bab sebelumnya, partisipasi sangat berperan dalam proses pembangunan, dimana sangat penting untuk melibatkan

masyarakat dalam setiap tahap pembangunan mengingat masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Menurut Adi (2007a, h. 27) definisi partisipasi masyarakat antara lain sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Definisi diatas memperlihatkan bahwa terdapat keterlibatan aktif dari masyarakat dapat terlihat dari tahap awal yaitu identifikasi masalah yang dihadapi bersama, pengambilan keputusan, serta tahapan implementasi kegiatan pembangunan yang menjawab permasalahan tersebut. Peran masyarakat menjadi diutamakan dalam berbagai tahap pembangunan karena mereka lebih mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri.

Definisi lain dikemukakan oleh Stiefel & Wolfe (1994) dalam John (2001, h. 4), "Partisipasi merupakan upaya terorganisir untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh berbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dari fungsi pengawasan semacam itu". Hal ini menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu tahap pencapaian pembangunan yang berkesinambungan dimana partisipasi masyarakat dalam jumlah besar sangat dibutuhkan di dalamnya.

Sedangkan menurut Soelaiman (1980), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seluruh warga masyarakat secara inklusif di dalam proses pembuatan keputusan, penyusunan, perencanaan suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Dari beberapa definisi yang dijabarkan diatas, dapat ditarik benang merah sebagai batasan konsep partisipasi dalam penelitian ini, bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam mengambil bagian, membentuk, serta melaksanakan suatu perubahan yang tententukannya sendiri. Partisipasi yang dimaksud adalah peran serta

masyarakat berdasarkan prinsip kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Adapun Ndraha (1990, h. 103-104) mengemukakan bentuk (tahap) partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Cohen dan Uphoff menamakan ini '*participation in benefits*'.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tahapan partisipasi diatas, batasan tahap partisipasi masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap partisipasi kelima, yaitu partisipasi dalam memelihara hasil pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang dimaksud mencakup peran serta atau keterlibatan masyarakat Tegal Gundil dalam proses pemeliharaan perpustakaan masyarakat dan pengawasan terhadap segala aktivitas di dalamnya secara sukarela.

Lebih lanjut, Soelaiman (1980, h. 17) menjelaskan fungsi-fungsi partisipasi sebagai berikut:

1. Pengarah dan penggerak proses perubahan berencana

2. Pendidikan dan proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat
3. Penghimpun sumber dana dan daya pembangunan
4. Pemupuk harga diri dan kepercayaan diri masyarakat
5. Pemeliharaan kesadaran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas sosial masyarakat.
6. Pemerataan kegiatan-kegiatan pembangunan dan kesempatan untuk ikut memetik manfaat dan hasilnya.
7. Pengawasan sosial masyarakat

Dari fungsi-fungsi di atas, terlihat bahwa partisipasi akan memberikan efek individual seperti diperolehnya pengetahuan baru, terjadinya perubahan sikap, terbangunnya kepemimpinan dan rasa percaya diri. Selain efek individual tersebut, partisipasi juga dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang dihasilkan, yaitu menjadi lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, lebih diterima dan dengan demikian lebih mudah diterapkan.

Adapun partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam berbagai pelayanan berbasis komunitas (*community based services*) merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini mengingat tuntutan berbagai pelayanan pemerintah yang semakin meningkat seiring kondisi masyarakat yang semakin berkembang. Namun, di sisi lain, sumber daya yang dimiliki negara tidak meningkat cepat seiring tuntutan masyarakat tersebut.

Partisipasi menjadi penting dalam pendekatan pembangunan sosial yang mengalami pergeseran dimana masyarakat tidak ditempatkan sebagai obyek, tetapi berfungsi sebagai subyek dan pusat pembangunan. Seperti dikemukakan oleh Adi (2002, h. 50) bahwa, “Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material, maupun finansial diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan di komunitas tersebut”.

Dengan demikian sangat penting melibatkan masyarakat dalam upaya pengembangan maupun pemberdayaan perpustakaan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, pendirian perpustakaan yang dilaksanakan atas andil

masyarakat akan lebih menghasilkan nilai positif, dimana selain rasa kebersamaan yang dibangun, ada juga rasa memiliki dalam diri masyarakat. Nilai-nilai tersebut berpengaruh dalam usaha keberlanjutan pelestarian perpustakaan yang mereka dirikan, serta usaha-usaha agar perpustakaan masyarakat menjadi mandiri, berkembang dan menjadi pusat belajar bagi masyarakat. Selain itu, terdapat persamaan persepsi dan tujuan diantara perpustakaan dan masyarakat, yaitu perpustakaan merupakan bagian keseharian sebuah kehidupan yang terus berlangsung menuju masa depan yang lebih baik dan kaya akan ilmu.

2.5.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Chapin (1970) dalam Soelaiman (1980) melihat partisipasi kedalam lima dimensi sebagai obyek pengkajiannya yaitu: (1) Keanggotaan; (2) Kehadiran dalam pertemuan-pertemuan; (3) Sumbangan keuangan; (4) Keanggotaan dalam panitia setempat; (5) Kedudukan dalam jenjang kepemimpinan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Soelaiman (1980) menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan *participatory*, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri walaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai “umpan”.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Sedangkan dalam bukunya yang berjudul *Human Relations at Work*, Davis (1962) mengemukakan hal-hal yang dapat disumbangkan dalam rangka berperan serta atau berpartisipasi terhadap suatu kegiatan, antara lain:

1. Pikiran (*psychological participation*)

2. Tenaga (*physical participation*)
3. Pikiran dan tenaga (*psychological dan physical participation*)
4. Keahlian (*participation with skill*)
5. Barang (*material participation*)
6. Uang (*money participation*)

Dengan demikian, partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, keterampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu wadah atau media yang sangat urgen bagi masyarakat dalam memudahkan penyampaian pendapatnya, seringkali menjadi salah satu kendala tersendiri dalam memaksimalkan peran partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu penyediaan sarana maupun jalur komunikasi yang efektif meliputi pertemuan-pertemuan atau rembug-rembug umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik tertulis maupun tidak tertulis.

2.5.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Menciptakan dan mempertahankan partisipasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi meningkatkan efektivitasnya. Tantangan yang paling besar ke depan adalah bagaimana agar akses yang telah diperoleh warga dalam pengambilan keputusan pada akhirnya akan menghasilkan keadilan sosial. Dalam penelitian ini bagaimana akses perpustakaan masyarakat yang telah diperoleh warga berpartisipasi dapat menciptakan keadilan sosial serta mampu mencapai tujuan-tujuan lain, contohnya meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja.

Soelaiman (1980, h. 9-10) mengemukakan faktor internal dan eksternal sebagai unsur-unsur dasar partisipasi sosial, diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor internal, mencakup unsur-unsur dasar dalam diri anggota masyarakat, antara lain:
 1. Kepercayaan diri

2. Solidaritas dan integritas sosial
 3. Tanggung jawab sosial dan komitmen
 4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri
 5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat
 6. Kepekaan dan ketanggapan terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat
- b. Faktor eksternal, mencakup unsur luar/lingkungan yang diperlukan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi, antara lain:
1. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.
 2. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan terjadinya partisipasi, mobilitas penduduk dan arus urbanisasi yang memungkinkan adanya integritas dan solidaritas masyarakat dalam suatu kesatuan tempat tinggal.
 3. Komunikasi yang intensif di antara sesama warga masyarakat, di antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem luarnya.
 4. Iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan serta mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat.

Faktor internal dan eksternal di atas menjadi acuan dalam mengkaji motif seseorang yang terdorong untuk berpartisipasi maupun yang mengalami hambatan berpartisipasi terhadap suatu kegiatan pembangunan. Namun, faktor pendorong partisipasi terhadap suatu kegiatan pembangunan harus ditumbuhkembangkan. Berdasarkan hasil penelitian Blustain (1980) dalam Ndraha (1990), masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Poin ketiga diatas terkait dengan teori pertukaran (*exchange theory*) yang dikemukakan Peter M. Blau dalam Teori Sosiologi Modern (Ndraha, 1990). Teori ini menjelaskan bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, maka semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu. Demikian juga konsep partisipasi masyarakat dalam penelitian ini, semakin banyak manfaat yang diperoleh anggota masyarakat Tegal Gundil di Kedai Baca SABAR, semakin aktif pula partisipasi mereka di perpustakaan masyarakat tersebut.

Sedangkan Watson dalam Adi (2007, h. 259-274) menggambarkan beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan pembangunan, antara lain:

1. Faktor Internal (hambatan yang berasal dari kepribadian individu)
 - a. Kestabilan (*Homeostatis*)

Homeostatis merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan (*stabilizing forces*) dorongan-dorongan dari luar. Tubuh manusia memiliki mekanisme untuk mengatur perubahan fisiologis, seperti temperatur, kadar gula, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu jika tidak diikuti dengan penguatan yang relatif terus menerus dari sistem yang melingkupinya (tidak diikuti program lanjutan untuk menstabilkan hasil latihan).

Sebagai contoh, perilaku mahasiswa yang baru saja mengikuti *sensitivity training* (pelatihan untuk meningkatkan kepekaan individu) cenderung akan lebih terbuka dan mau menerima masukan (*receptive*) dari rekan-rekannya, tetapi setelah beberapa bulan kemudian, dorongan yang didapat melalui *sensitivity training* tersebut melemah dan dorongan ‘asal’ kembali muncul sehingga ia kurang *receptive* lagi. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa dorongan yang sudah stabil dalam diri seseorang (*homeostatis*) dapat menghambat perubahan yang telah direncanakan melalui kegiatan *sensitivity training*.

b. Kebiasaan (*Habit*)

Sebagian pakar dari teori belajar (*learning theory*) berasumsi bahwa jika tidak ada perubahan situasi yang tak terduga, setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaannya. Allport (1937) memperkenalkan istilah “otonomi fungsional” (*functional autonomy*) untuk menggambarkan fakta yang terjadi bahwa aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan seseorang sebagai suatu cara untuk mencapai suatu kepuasan seringkali, secara intrinsik, diterima sebagai suatu tindakan yang sebaiknya dilakukan, misalnya kebiasaan merokok, kebiasaan makan malam lebih banyak dari makan pagi, dan lain sebagainya.

Faktor internal ini di satu sisi dapat membantu *community worker* untuk mengembangkan rencana perubahan, tetapi disisi lain, kebiasaan dapat menjadi faktor penghambat. Sebagai contoh, dalam program pengembangan pola hidup sehat pada komunitas di pemukiman kumuh, *community worker* ingin membiasakan komunitas tersebut untuk buang air besar di WC atau membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Padahal di pemukiman tersebut nilai individual yang ada pada umumnya menganggap bahwa buang air besar di kali ataupun di selokan depan rumah dan makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu adalah hal yang menguntungkan serta mereka biasa melakukannya.

c. Hal yang utama (*Primacy*)

Merupakan hal-hal yang berhasil mendatangkan hasil yang memuaskan. Jika tindakan yang pertama dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu, ia cenderung mengulangnya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama). Sebagai contoh, orang yang sudah menganggap obat 'X' sebagai obat yang cocok untuk meredakan sakit kepala yang diderita, cenderung menggunakan obat tersebut pada saat ia menderita sakit kepala. Jika ia disarankan untuk beristirahat saja dan tidak menggunakan obat 'X', misalnya karena obat tersebut merupakan salah satu obat penenang, ia cenderung untuk menolak informasi tersebut.

d. Seleksi ingatan dan persepsi (*Selective perception and retention*)

Jika seseorang terhadap "obyek sikap" telah terbentuk, tindakan yang dilakukannya di saat-saat yang berikutnya akan disesuaikan dengan "obyek sikap" yang ia jumpai. Misalnya, bila X menganggap bahwa orang Batak itu orang yang kasar dan orang Jawa itu orang yang halus, maka jika X berjumpa dengan orang Batak ("obyek sikap" pertama) ia akan memberikan respons yang berbeda bila dibandingkan ia berbicara dengan orang Jawa. Dalam hal ini, stereotip mengenai orang Batak dan Jawa yang diketahui oleh X menentukan cara X bertindak. Keadaan tersebut merupakan salah satu bentuk penyeleksian persepsi yang diterima oleh individu, dimana di satu sisi dapat membantu *community worker* dan masyarakat dalam mengambil keputusan, tetapi di sisi lain penyeleksian ini dapat menjadi penghambat. Sebagai contoh, jika seseorang merasa antipati terhadap salah satu pembimbing keterampilan yang berasal dari suku tertentu hanya berdasarkan stereotip yang ia kembangkan sebelumnya tanpa memerhatikan kemampuan dari pembimbing tersebut.

e. Ketergantungan (*Dependence*)

Ketergantungan seseorang terhadap orang yang lebih dewasa dapat pula menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Jika dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain, proses “pemandirian” masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.

f. Superego

Superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaruan, dan kadangkala menganggap pembaruan sebagai suatu yang tabu. Dorongan superego yang berlebihan ini menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula karena dorongan dari Id lebih sering teredam dan tak tersalurkan. Keadaan seperti inilah yang menghambat suatu inovasi yang diperkenalkan oleh *community worker* kepada masyarakat tersebut.

g. Rasa tidak percaya diri (*Self-distrust*)

Rasa tidak percaya diri dapat merupakan konsekuensi dari ketergantungan sejak masa kanak-kanak yang berlebihan, serta dorongan dari superego yang kuat sehingga ia merasa perlu menghindari dorongan yang datang dari dirinya sendiri. Rasa tidak percaya diri ini bila terus berlanjut pada akhirnya dapat membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan.

h. Rasa tidak “aman” dan regresi (*Insecurity and regression*)

Merupakan kecenderungan untuk mencari “rasa aman” yang ia peroleh di masa lalu. Mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan “kecemasan dan ketakutan” (*anxiety*) mereka. Sehingga, mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaruan.

i. Faktor predisposisi (*Predisposing factors*)

Merupakan sesuatu yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional

terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang (*those antecedents to behaviour that provide the rationale or motivation for the behaviour*), seperti pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan persepsi dari komunitas sasaran. Pada intinya, faktor predisposisi ini mengarah pada perilaku yang belum nyata (*covert behaviour*) dari komunitas sasaran. Misalnya, setelah dilakukan penelitian yang terkait dengan tingginya anak bayi dengan BBLR (Berat Bayi Lebih Rendah) di Indonesia, ternyata lebih dari 50% ibu yang mempunyai anak yang BBLR pada masa kehamilannya memiliki keyakinan (*beliefs*) bahwa anak tidak perlu dilahirkan terlalu berat karena nanti bayi tersebut bisa digemukkan setelah ia dilahirkan. Jadi mereka memiliki persepsi bahwa selama di dalam rahim, bayi tidak perlu terlalu berat sehingga proses melahirkan menjadi mudah. Kepercayaan dan keyakinan ini merupakan faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku ibu dalam mengonsumsi makanan sehari-hari dan pada akhirnya mempengaruhi tingginya angka bayi lahir dengan BBLR.

2. Faktor Eksternal (hambatan yang berasal dari sistem sosial)

a. Kesepakatan terhadap norma tertentu (*Conformity to norms*)

Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis ‘mengikat’ sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaruan) yang ingin diwujudkan. Misalnya pada komunitas yang memiliki norma yang menghalalkan perjudian, minuman keras, dan prostitusi. Maka akan sulit bagi pelaku perubahan untuk merombak norma tersebut.

b. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*Systemic and cultural coherence*)

Seperti apa yang dipahami sebagai prinsip dasar dalam Gestalt dimana “setiap bagian dari suatu bentuk tertentu mempunyai karakteristik dari bentuk tersebut sebagai hasil dari interaksi dengan totalitas bentuk tersebut”. Berdasarkan pandangan ini dapat dipahami

bahwa perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain. Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem, tetapi berbagai sistem yang saling kait-mengait, menyatu, dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan yang mantap (*steady state*).

Perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah begitu menyatu pada masyarakat tentunya akan sangat sulit dilakukan. Karena komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada.

c. Kelompok kepentingan (*Vested interests*)

Adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan, dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lainnya.

d. Hal yang bersifat sakral (*The sacrosanct*)

Berdasarkan penelitian beberapa antropolog, Watson, melihat bahwa pada berbagai budaya, beberapa kegiatan tertentu tampak lebih mudah berubah dibandingkan beberapa kegiatan yang lain. Salah satu yang memiliki nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap “sakral”.

e. Penolakan terhadap “orang luar” (*Rejection of “outsiders”*)

Dari sudut pandang psikologi dikatakan bahwa manusia memiliki sifat universal, salah satunya adalah ia memiliki rasa curiga dan rasa terganggu (*hostility*) terhadap orang asing. Oleh karena itu, *community worker* harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi “orang luar” dalam masyarakat tersebut.

f. Faktor penguat perubahan (*Reinforcing factors*)

Merupakan sesuatu yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud (*those antecedents to behaviour that facilitate a motivation to be realized*). Jika faktor predisposisi mengarah pada faktor *covert behaviour* dari komunitas sasaran, faktor penguat perubahan lebih mengarah pada *covert behaviour* dan *overt behaviour* (perilaku nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain) dari pihak-pihak terkait dengan komunitas sasaran. Dalam kasus anak BBLR sebelumnya, pandangan ibu terhadap pola konsumsi ibu hamil dan pola makan mereka dipengaruhi oleh masukan dari orang-orang di sekitar mereka (orang tua, kerabat, dan sebagainya). Sehingga pengetahuan, sikap, persepsi, maupun perilaku dari orang-orang di sekitar mereka merupakan faktor penguat perubahan (*reinforcing factors*) terhadap perilaku ibu hamil tersebut.

g. Faktor pemungkin perubahan (*Enabling factors*)

Merupakan faktor yang mengikuti (*subsequent*) suatu perilaku dan menyediakan “imbalan” (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut. Faktor ini seringkali merupakan kondisi yang ada di lingkungan komunitas sasaran yang memfasilitasi meningkatnya ataupun dapat menghambat kinerja individual ataupun organisasi, sebagai contoh ketersediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan komunitas sasaran, keterjangkauan komunitas sasaran dengan layanan yang disediakan, ataupun tersedianya pelatihan guna mengembangkan keterampilan baru bagi komunitas sasaran. Faktor pemungkin perubahan ini akan mempengaruhi secara tidak langsung faktor penguat perubahan, kemudian faktor penguat perubahan akan mempengaruhi faktor predisposisi.

Untuk mengurangi hambatan-hambatan diatas, Watson juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat pula menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Hambatan yang ada dapat dikurangi jika komunitas dapat merasakan bahwa perubahan yang mereka lakukan bukanlah perubahan yang dilakukan oleh “orang luar”.
2. Hambatan dapat dikurangi jika proyek pengembangan masyarakat didukung baik oleh masyarakat dan para pemimpin puncak yang terkait.
3. Hambatan dapat dikurangi jika partisipan (warga komunitas) dapat melihat bahwa perubahan yang dilakukan dapat mengurangi beban yang mereka rasakan dan bukan sebaliknya.
4. Hambatan dapat dikurangi jika proyek atau program pengembangan masyarakat yang dijalankan sesuai (tidak bertentangan) dengan norma dan nilai dalam masyarakat.
5. Hambatan dapat dikurangi jika program pengembangan dapat menampilkan hal yang baru dan menarik minat warga masyarakat.
6. Hambatan dapat dikurangi jika warga masyarakat merasa bahwa otonomi dan “keamanan” mereka tidak terancam.